**KALTIM SUMMIT II 2013**

**HASIL RUMUSAN KELOMPOK 1**

**DAYA SAING EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Moderator | : | Prof. Dr. H. Daddy Ruchiyat |  |
| Fasilitator | : | Prof Dr. Hj. Eny Rochaida |  |
| Sekretaris | : | Kabid Ekonomi Bappeda Prov. Kaltim | |

Peserta Diskusi : Terlampir

Diskusi Kelompok 1 yang membahas daya saing ekonomi dan lingkungan hidup, memfokuskan pembahasan pada beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut :

1. Catatan apa dalam konteks Daya Saing Ekonomi dan Lingkungan Hidup yang bisa Anda sampaikan sebagai masukan terkait dengan paparan para nara sumber Sesi I kemarin ?
2. Bagaimana upaya peningkatan daya saing ekonomi/pelestarian dan perbaikan lingkungan hidup agar mampu merealisasi Visi dan Misi Kaltim Maju 2030 serta bagaimana hal tersebut di terjemahkan dalam RPJMD 2014-2018.
3. Tantangan dan peluang apa yang harus diperhatikan terkait upaya peningkatan daya saing ekonomi dan pelestarian dan perbaikan lingkungan hidup di Kaltim yang harus diperhatikan dalam lima tahun ke depan (2014-2018) menuju Visi Kaltim Maju 2030

Dari hasil pencermatan pada paparan yang disampaikan oleh narasumber dan diskusi kelompok disepakati bahwa terdapat beberapa saran untuk di tindak lanjuti guna perbaikan Rancangan Awal RPJMD dalam kerangka Visi Kaltim Bangkit 2030 yang memiliki visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang berkelanjutan dan berkeadilan, dengan hasil sebagai berikut :

1. Strategi Kebijakan Transformasi Ekonomi Pasca Migas dan Batubara menuju Visi Kaltim Maju 2030 harus dibangun bersama dan disepakati oleh seluruh Mayarakat Kaltim untuk selanjutnya dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan mengembangkan mekanisme feedback agar seluruh stake holder dapat memberikan masukan untuk memastikan masyarakat luas diberikan kesempatan dalam pembentukan arah dan strategi pembangunan Kaltim melalui mekanisme Kaltim Summit sehingga terjadi harmonisasi antara kebijakan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten Kota.
2. Diperlukannya konsistensi penerapan sustainable development dalam pembangunan Kaltim. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan penghematan sumber daya alam tak terbarukan dan mencari dan diversifikasi sumber-sumber ekonomi baru terbarukan dengan kreatif misal pengembangan pariwisata.
3. Kedepan ekonomi Kalimantan Timur perlu didorong pada upaya penambahan nilai tambah dan tidak ekstraktif sehingga permintaan antara semakin meningkat. Upaya transformasi ini memerlukan SDM yang berdaya saing dan teknologi yang memadai
4. Perlunya pengembangan SDM yang kompeten serta dipastikan link and match dengan kebutuhan daerah dan pasar, untuk untuk menyongsong transformasi ekonomi, dan penyediaan teknologi .
5. Memastikan ketersediaan anggaran dalam mengakomodasi program dan kegiatan sesuai arah kebijakan dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, khususnya Penyediaan anggaran untuk pengembangan Penelitian dan Pengembangan dan penyediaan beasiswa untuk mendukung kesiapan SDM.
6. Sektor Pariwisata adalah salah satu diversifikasi pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, multiplier efeknya besar, bersifat community based.
7. Destinasi pariwisata tergantung pada infrastruktur, konektivitas dan pengembangan sarana dan prasarana umum didukung oleh penyediaan pelayanan untuk menarik investasi.
8. Diperlukan pembangunan kelembagaan asosiasi pariwisata dan badan promosi pariwisata daerah sebagai lembaga koordinasi sehingga daerah tidak jalan sendiri-sendiri dan oleh karena itu diperlukan kesamaan kebijakan yang saling mendukung pengembangan pariwisata.
9. Pulau Derawan dan Sangalaki termasuk dalam 16 KSN yang terpilih untuk dikembangkan secara nasional. Disamping tiga kawasan lainnya yang ada di kaltim yaitu kawasan Long Bawan dan sekitarnya, kota bangun dan tanjung isuy dan kawasan Kayan Mentarang.
10. Pengembangan sektor pariwisata ke depan harus ber-visi ramah lingkungan, melestarikan nilai sosial-budaya, dan berkelanjutan, tidak bertentangan dengan etika dan moral.
11. Upaya pengembangan pariwisata kuliner penting untuk dilakukan di Kaltim, dengan memperhatikan pemenuhan bahan baku yang berasal dari pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan serta perlu nya pengembangan pariwisata di pulau pulau terluar dalam konteks NKRI.
12. Dalam pengembangan daya saing ekonomi daerah perlu mengintegrasikan antara daya saing produk dan daya saing daerah dengan pengembangan kawasan industri (KEK) untuk mendorong pusat –pusat pertumbuhan ekonomi dengan memfokuskan pada upaya hilirisasi produk kelapa sawit, serta mengintegrasikan jenis –jenis industri yang saling mendukung.
13. KEK Maloy strategis menjadi tulang punggung ekonomi Kalimantan Timur dimasa mendatang. Hal ini didukung dengan rencana pembangunan perkebuan kelapa sawit seluas 2,4 juta hektar. Hal yang menjadi perhatian adalah keterlibatan masyarakat melalu pengembangan perkebunan rakyat dan mengawal pendanaan untuk kegiatan-kegiatan utama dalam RPJMD. Penetapan Kawasan Maloy menjadi Kawasan Ekonomi Khusus bernilai strategis secara nasional berkaitan denganLokasinya pada ALKI II, kelembagaan pengusul yang merupakan kolaborasi pemerintah -swasta, jenis industry yang akan dikembangkan meliputi oleochemical dan mineral dan luasan kawasan pengembangan.
14. Pembangunan kawasan Industri di Kalimantan Timur sebaiknya dilakukan dengan pendekatan klaster yang lebih bersifat *bottom up daripada* *top down.* Diperlukan penetapan rantai suplai yang tepat dan industri pendukung yang terkait. Termasuk juga penyediaan infrastruktur berkualitas, insentif yang memadai, kualitas tenaga kerja yang kompeten dan penerapan good governance. Pembangunan Kawasan Industri merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka meningkatkan komponen intermediate produk, mengantisipasi larangan ekspor barang mentah dan keharusan pembangunan industry dalam suatu kawasan industry.
15. Untuk memastikan visi Kaltim Maju 2030, khususnya dalam upaya hilirisasi ini maka arah kebijakan khususnya dalam pengembangan KEK Maloy perlu secara khusus di akomodasi dalam RPJMD dan RKP setiap tahunnya sehingga pola pengembangan dan investasinya dapat dilakukan secara konsisten.
16. Kalimantan Timur telah berkomitment untuk menerapkan konsep Green Growth/Green Ekonomi yang mencakup tujuan-tujuan : (a). Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, (b). Ekosistem yang sehat dan produktif untuk penyediaan jasa, (c). Pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan, (d). Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan, (e). Penurunan gas rumah kaca. Dengan prinsip dasar bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan bersama-sama dengan penurunan emisi, dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berprinsip Pro Growth, Pro-Poor dan Pro-job dan Pro-Enviroment.
17. Tujuh bidang strategis bisa menjadi katalis penerapan Green Growth dalam pembangunan Kaltim adalah:

* Pembatasan produski sektor primer (migas dan batubara)
* Pengembangan industri bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan
* Pengembangan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas
* Pengembangan industri turunan migas dan batubara
* Pengembangan industri pertanian dalam arti luas
* Pengembangan EBT, sektor jasa, perdagangan dan keuangan
* Pengembangan infrastruktur pendukung industri

1. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan Konsensus RTRWP yang memprioritaskan pembangunan pada lahan-lahan terdegradasi, intensifikasi atau restorasi serta meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan, dan melakukan perlindungan atau pengelolaan berkelanjutan terhadap sumberdaya alam yang masih ada (misal :tegakan hutan yang memiliki HCV dan yang memiliki cadangan karbon tinggi).
2. Dalam hal ini pembatasan pemberian ijin dan perbaikan tata kelola perijinan pemanfaatan pemanfatan dan alih fungsi lahan untuk terus di kawal dalam pelaksanaannya. Dalam penataan perizinan diperlukan Pengembangan Sistim Pengelolaan Informasi Perizinan dengan konteks pengembangan PTSP yang telah dilakukan di Kaltim.
3. Kebijakan, peraturan dan insentif yang dapat mendorong sektor swasta /pengguna lahan untuk melakukan kegiatan intensifikasi daripada berekspansi serta memperluas pengembangan Energi Baru dan Terbarukan.
4. Gasifikasi batubara, pengembangan CBM serta shell gas di Kaltim sangat berpeluang dilakukan di Kaltim untuk menyediakan bahan baku dan sumber energy baru, untuk itu diperlukan kajian dan penyediaan teknologi dan SDM yang memadai.
5. Perlunya menerobos kendala-kendala peraturan dalam pengembangan industri kehutanan untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi Kaltim.
6. Perlunya pengembangan sektor pertanian dalam arti luas dalam pola Integrated Food and Energy Production Complex dengan tujuan ketahanan dan kemandirian pangan, mengingat sektor pertanian berperan multi fungsi dalam pengembangan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu perlu investasi yang tepat pada sektor pertanian ini.
7. Seluruh masukan dan saran lain yang disampaikan oleh peserta diskusi yang belum masuk dalam rumusan ini dipastikan telah tercatat oleh secretariat dan akan digunakan dalam pembahasan dan perbaikan dalam proses RPJMD dan visi Kaltim maju 2030 lebih lanjut

SEKIAN